



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS 2015-2019
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 22-24 JANUARI 2017**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “ mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Februari 2015, Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas 2015-2019 dengan jumlah RUU yang direncanakan untuk dibentuk sebanyak 160 RUU. Namun dalam perkembangannya, jumlah RUU yang masuk

dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 bertambah 9 RUU pada saat penetapan Prolegnas Prioritas 2016, dan bertambah lagi 12 RUU pada saat penetapan Prolegnas Prioritas 2017, sehingga total Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 sampai hari ini 182.

Kemudian berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2016 antara Badan Legislasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menyepakati bahwa RUU yang sudah dalam pembicaraan Tingkat I, RUU yang sudah diharmonisasi dan menunggu surat Presiden untuk pembahasan, serta RUU yang sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi, disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. Jumlah keseluruhan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 adalah 49 RUU.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU PPP juncto Pasal 105 ayat (1) huruf i UU MD3.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 22-24 Januari 2017 di Provinsi Kalimantan Timur bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

D. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 ke Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	A-273	Firman Soebagyo., SE., MH	F.PG	KETUA TIM/WK. BALEG
2	A-163	Ono Surono	F.PDIP	ANGGOTA
3	A-271	Dr. H. Noor Achmad., MA	F.PG	ANGGOTA
4	A-275	Endang Sri Karti Handayani., SH., M.Hum	F.PG	ANGGOTA
5	A-56	Drs. H. Taufiq R. Abdullah	F.PKB	ANGGOTA
6	A-110	Drs. H.M. Martri Agoeng., SH	F.PKS	ANGGOTA
7	A-36	Sulaeman L. Hamzah	F.PNASDEM	ANGGOTA
8	-	Michiko Dewi, S.H.	SEKRETARIAT	
9	-	Nanik Sulistyawati., S.A.P		
10		Jainuri Achmad Imam S., S.A.P.		
11	-	Widodo., SH., M.H.	TENAGA AHLI	
12	-	Adi Setiani., S.H., M.Hum.		
13		Abdul Ajib	TV PARLEMEN	

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi dari Univ. Lambung Mangkurat, IAIN Antasari, dan Univ. Achmad Yani, Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Organisasi/Himpunan Pengusaha dan Perwakilan Organisasi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

F. Hasil Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dipimpin oleh ketua tim, aspirasi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur terkait RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 dapat disarikan sebagai berikut:

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Awang Farouk):

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agro Industri dan Energi yang Ramah Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 5 (lima) misi utama pembangunan Kalimantan Timur sebagai berikut:

- Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
- Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
- Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;
- Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.

Kelima misis tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) dan mendukung terciptanya keadaan lingkungan yang lebih baik (*pro-environment*).

Upaya pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Timur sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan norma-norma:

1. Pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
2. Pembangunan tidak boleh menciptakan dan memperlebar ketimpangan;
3. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menurunkan daya dukung dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada: 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 3. Percepatan pengentasan kemiskinan; 4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.; 5. Pengembangan ekonomi kerakyatan; 6. Percepatan transformasi ekonomi; 7. Pemenuhan kebutuhan energy ramah lingkungan; 8. Pengembangan agribisnis; 9. Peningkatan produksi pangan; 10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar; 11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Di samping peningkatan pencapaian kinerja pembangunan, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, antara lain:

1. Menurunnya pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah;
2. Over regulasi yang menghambat percepatan pembangunan sektor;



Ketua Tim Sosialisasi Prolegnas RUU Tahun 2017 dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Transformasi struktur ekonomi ke arah sumberdaya alam yang terbarukan masih berjalan lambat. Lambatnya proses transformasi struktur ekonomi di Kalimantan Timur terkendala pada keterbatasan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung proses hilirisasi produk-produk unggulan non migas, seperti CPO, karet dan produk pertanian tanaman pangan. Investasi pada sektor energi dan infrastruktur yang merupakan prasyarat utama dalam proses produksi hilirisasi produk-produk tersebut.

Kalimantan Timur berterima kasih dan sangat mendukung RUU yang menjadi perhatian Badan Legislasi DPR RI untuk Kalimantan Timur yaitu antara lain: RUU tentang Minerba, RUU tentang Migas, RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat; RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta RUU tentang Perkelapasawitan. Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur berharap RUU yang menjadi Prioritas Tahun 2017 dapat menjadi solusi atas permasalahan yang kerap terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur juga mengusulkan pemekaran daerah (Daerah Otonomi Baru), yaitu:

- Peningkatan status Kecamatan Sebatik menjadi Kota Sebatik;
- Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Berau Pesisir; dan
- Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Paser Selatan.

Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kutai Timur Utara dan Kabupaten Kutai Pesisir belum dapat dilakukan karena belum memenuhi syarat.

Secara kebetulan, pada saat pelaksanaan sosialisasi di Kantor Gubernur, tim kunjungan kerja mendapati bahwa di halaman kantor Gubernur Kaltim sedang dilakukan unjuk rasa oleh petani kelapa sawit sehubungan dengan sengketa lahan.

G. Penutup

Simpulan dari kunjungan kerja penyerapan aspirasi ke Provinsi Kalimantan Timur:

1. Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mendukung RUU Prioritas 2017, khususnya yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:
 - a. RUU tentang Migas;
 - b. RUU tentang Minerba;

- c. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat;
 - d. RUU tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
 - e. RUU tentang Perkelapasawitan.
2. Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan mengusulkan pemekaran daerah (Daerah Otonomi Baru), yaitu:
 - Peningkatan status Kecamatan Sebatik menjadi Kota Sebatik;
 - Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Berau Pesisir; dan
 - Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Paser Selatan.
 3. RUU yang telah menjadi Prioritas dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 ke Provinsi Kalimantan Timur. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan bersama untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan kualitas legislasi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, JANUARI 2017
TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS 2015-2019
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KETUA TIM
ttd
FIRMAN SOEBAGYO., S.E., M.H.

A-273